

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Auditing

2.1.1.1 Pengertian Auditing

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2011:4)

auditing adalah:

“Auditing is accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

Artinya auditing adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai berbagai kejadian ekonomi (informasi) guna menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi (informasi) dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan independen.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:4) auditing adalah:

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut Wiliam F. Messier, Steven M. Glover dan Douglas F. Prawitt (2014:12) auditing adalah:

“Auditing adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dari mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa audit atau pemeriksaan harus dilakukan oleh orang yang berindependen dan berkompoten terhadap laporan keuangan yang disajikan kliennya atau manajemen untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang memenuhi standar yang telah ditentukan dan tujuannya adalah untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan.

2.1.1.2 Tujuan Audit

Tujuan umum audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup, auditor perlu mengidentifikasi dan menyusun sejumlah tujuan audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan.

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (2001), tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah:

“Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan

entitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.”

Menurut Arrens, dkk (2015:168) tujuan audit adalah:

“Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.”

Menurut Abdul Halim (2015:157) tujuan audit adalah:

“Untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.”

Menurut Theodorus M. Tuannakotta (2014:84) tujuan audit adalah:

“Tujuan audit adalah untuk mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.”

2.1.1.3 Jenis-jenis Audit

Audit dibagi menjadi beberapa jenis, pembagian ini dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya pengauditan tersebut.

Menurut Alvin A. Arrens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2011:16-19) Jenis-jenis audit dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit Operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang. Dalam audit operasional, *review* atau penelaah yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas semua bidang lain dimana auditor mengevaluasinya. Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektivitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih sulit daripada audit ketaatan dan audit keuangan. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit operasional juga bersifat sangat subjektif.

2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Audit Ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, Sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau salah saji lainnya.

2.1.1.4 Jenis-jenis Auditor

Dalam mendukung terlaksananya proses auditing, dibutuhkan pihak independen yang melakukan proses auditing tersebut yaitu auditor. Auditor diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

Menurut Alvin A. Arrens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2011:19-21) jenis-jenis auditor dibedakan menjadi lima jenis, yaitu:

1. Auditor Independen (Kantor Akuntan Publik)

Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka. Kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil, oleh karena luasnya pengguna laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan kantor akuntan publik (KAP) dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. Sebutan KAP mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. KAP sering kali disebut dengan auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

2. Auditor Internal Pemerintah

Auditor Internal Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melayani kebutuhan pemerintah. Porsi utama upaya audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah.

3. Auditor Badan Pemeriksaan Keuangan

Auditor Badan Pemeriksaan Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh kepala BPK, melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR. BPK mengaudit sebagai besar informasi laporan keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR. Oleh karena kuasa pengeluaran dan penerimaan badan-badan pemerintah ditentukan oleh undang-undang, maka audit yang dilaksanakan difokuskan kepada audit ketaatan.

4. Audit Pajak

Bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini bersifat ketaatan dan auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak.

5. Auditor Internal

Auditor Internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung kepada yang mempekerjakan mereka, ada staf audit internal yang hanya terdiri atas satu atau dua karyawan yang melakukan audit ketaatan secara rutin. Kelompok audit internal bisa melapor langsung kepada direktur utama, salah satu pejabat tinggi eksekutif lainnya atau komite audit dalam dewan komisaris. Akan tetapi auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen dari entitas tersebut selama masih ada hubungan antara pemberi kerja karyawan.

2.1.1.5 Standar Auditing

Untuk mencapai tujuan dalam auditing, auditor harus berpedoman pada standar pemeriksaan yang merupakan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan akuntan. Standar pemeriksaan atau standar auditing merupakan hal yang berkenaan dengan mutu pekerjaan akuntan.

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh IAI Kompartemen Akuntan Publik dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2011:150.1) adalah sebagai berikut:

1. Standar Umum
 - a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
 - a. Pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 - b. Pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 - c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar

yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan

- a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.1.2 Kompetensi Auditor

2.1.2.1. Pengertian Kompetensi Auditor

Menurut Sukrisno Agoes (2013:146) kompetensi adalah:

“Kompetensi adalah suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*) yang mencukupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya.”

Menurut Alvin A. Arens et.all (2012:42) kompetensi adalah:

“Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikut pendidikan profesional yang berkelanjutan.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suharyati (2010:3) definisi kompetensi adalah:

“Kompetensi adalah suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan) dan pengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menemukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.”

Menurut I Gusti Agung Rai (2010:61) kompetensi adalah:

“Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar, dan dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya.”

Berdasarkan definisi dari para ahli di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa suatu audit dilaksanakan oleh seorang auditor yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pelatihan teknis yang cukup yang dapat membantu auditor untuk bekerja secara objektif, sistematis, cermat dan seksama agar tercapainya tugas seorang auditor dengan hasil yang maksimal.

2.1.2.2. Karakteristik Kompetensi Auditor

Adapun beberapa karakteristik kompetensi menurut Lyle dan Spencer dalam Harhianto (2012:92) terdapat empat karakteristik kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Motif (*Motives*)
Motif adalah hal-hal yang seseorang pikirkan untuk memenuhi keinginannya secara konsisten yang akan menimbulkan suatu tindakan.
2. Karakteristik (*Trains*)
Karakteristik adalah ciri fisik dan respon-respon atau reaksi-reaksi yang konsisten terhadap situasi atau informasi.
3. Pengetahuan (*Knowladge*)
Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang-bidang tertentu.

4. Keterampilan (*Skill*)

Keterampilan adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu baik secara fisik ataupun mental.

2.1.2.3. **Komponen Kompetensi Auditor**

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suharyati (2010:25) komponen kompetensi auditor terdiri dari:

1. Komponen Pendidikan

Pencapaian keahlian dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan pendidikan formal yang diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup (IAI 2001).

Pendidikan dalam arti luas meliputi Pendidikan formal, pelatihan, atau Pendidikan berkelanjutan.

2. Komponen Pengetahuan

Berdasarkan SPAP (IAI:2011) tentang standar umum, bahwa dalam melaksanakan audit, auditor harus memiliki keahlian dan struktur pengetahuan yang cukup. Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seseorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang dijalankannya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Definisi pengetahuan menurut ruang lingkup audit adalah kemampuan penguasaan auditor atau akuntan pemeriksa terhadap medan audit (penganalisaan terhadap laporan keuangan perusahaan).

Secara umum ada lima pengetahuan yang harus dimiliki oleh auditor yaitu:

a. Pengetahuan Pengauditan Umum

Pengetahuan pengauditan umum disini seperti risiko audit, prosedur audit dan lain-lain yang kebanyakan diperoleh auditor di pendidikan formal perguruan tinggi, dari berbagai pelatihan-pelatihan yang diikuti auditor dan dari pengalaman yang dimiliki oleh auditor.

b. Pengetahuan Area Fungsional

Pengetahuan area fungsional disini seperti perpajakan serta pengauditan dengan menggunakan komputer. Pengetahuan area fungsional sebagian didapat di pendidikan formal perguruan tinggi

dan sebagian besarnya didapat dari pelatihan-pelatihan yang diikuti auditor juga pengalaman yang dimiliki auditor.

c. Pengetahuan Mengenai Isu-isu Akuntansi yang Baru

Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling terbaru dapat auditor peroleh dari berbagai pelatihan profesional yang diikuti auditor dan diselenggarakan secara berkelanjutan.

d. Pengetahuan tentang Industri Khusus

Pengetahuan tentang idustri khusus biasanya diperoleh melalui pelatihan-pelatihan yang diikuti auditor juga pengalaman yang dimiliki auditor.

e. Pengetahuan tentang Bisnis Umum serta Penyelesaian Masalah

Pengetahuan tentang bisnis umum serta penyelesaian masalah diperoleh melalui pelatihan-pelatihan yang auditor ikuti serta diperoleh melalui pengalaman yang dimiliki auditor.

3. Komponen Pelatihan

Pelatihan lebih yang didapatkan oleh auditor akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perhatian kekeliruan yang terjadi. Auditor baru yang menerima pelatihan dan umpan balik tentang deteksi kecurangan menunjukkan tingkat skeptik dan pengetahuan tentang kecurangan yang lebih tinggi dan mampu mendeteksi kecurangan dengan lebih baik dibanding dengan auditor yang tidak menerima perlakuan tersebut. Untuk meningkatkan kompetensi perlu dilaksanakan pelatihan terhadap seluruh bidang tugas pemeriksaan, yang mencakup pelatihan manajemen, pelatihan keuangan atau akuntansi, pelatihan pajak dan pelatihan audit.

Menurut I Gusti Agung Rai (2010:63) terdapat tiga macam komponen kompetensi auditor, yaitu sebagai berikut:

1. Mutu Personal

Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, seperti:

- a. Rasa ingin tahu (*inquisitive*)
- b. Mampu menerima bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif
- c. Mampu bekerja sama dengan tim

2. Pengetahuan Umum

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang akan diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi:

- a. Pengetahuan teori organisasi untuk memahami suatu organisasi
- b. Kemampuan untuk melakukan *review* analisis (*analytical review*)

c. Pengetahuan auditing

Pengetahuan akuntansi akan membantu dalam mengolah angka dan data, namun karena audit kinerja tidak memfokuskan pada laporan keuangan maka pengetahuan akuntansi bukanlah syarat utama dalam melakukan kinerja audit.

3. Keahlian Khusus

Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki keahlian khusus, diantaranya:

- a. Keahlian untuk melakukan wawancara
- b. Keahlian dalam bidang statistik
- c. Kemampuan menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.

2.1.2.4. Aspek Kompetensi Auditor

Menurut Sukrisno Agoes (2013:163) kompetensi auditor mencakup tiga ranah, yaitu:

1. Kompetensi pada Ranah Kognitif

Kompetensi pada ranah kognitif mengandung arti kecakapan, kemampuan, kewenangan dan penugasan pada pengetahuan/*knowledge* seperti pengetahuan akuntansi dan disiplin ilmu terkait. Kompetensi pada ranah ini dikembangkan ke dalam penerapan sesungguhnya dari program yang direncanakan oleh auditor pada umumnya.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:86) penerapan program pengetahuan akuntansi dan disiplin ilmu terkait yang diterapkan adalah:

1. Pendidikan formal untuk memasuki profesi.
2. Pelatihan praktik dan pengalaman dalam auditing.
3. Mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan selama karir professional auditor.

2. Kompetensi pada Ranah Afektif

Kompetensi pada ranah afektif mengandung arti kecakapan, kemampuan, kewenangan dan penugasan pada sikap dan perilaku etis termasuk kemampuan berkomunikasi yang dicerminkan dengan prinsip-prinsip etika auditor.

Adapun prinsip-prinsip etika tersebut menurut Sukrisno Agoes (2013:163) adalah sebagai berikut:

1. Integritas

- a. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan professional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan

patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

- b. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan untuk keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.
 - c. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seorang berintegritas akan lakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya.
 - d. Integritas mengharuskan anggota untuk menaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis dan juga integritas mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip kehati-hatian professional.
2. Objektivitas
- a. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan oleh anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain.
 - b. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan objektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktik publik memberikan jasa atensi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemen di industri, pendidikan dan pemerintahan. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk ke dalam profesi. Apapun jasa atau kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara objektivitas.
 - c. Anggota memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemberian jasa professional mematuhi prinsip objektivitas.
 - d. Dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan objektivitas, pertimbangan yang cukup harus diberikan terhadap faktor-faktor berikut:
 - a) Ada kalanya anggota dihadapkan kepada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang

diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat mengganggu objektivitasnya.

- b) Ukuran kewajaran (*reasonableness*) harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan merusak objektivitas anggota.
- c) Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias, atau terpengaruh lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari,
- d) Anggota memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemberian jasa professional mematuhi prinsip objektivitas.
- e) Anggota tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau entertainment yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan professional mereka atau terdapat orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Anggota harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi professional mereka ternoda.

3. Kerahasiaan

- a. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa professional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir.
- b. Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau professional untuk mengungkapkan informasi.
- c. Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan.
- d. Kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi, kerahasiaan juga mengharuskan anggota yang memperoleh informasi selama melakukan jasa professional tidak menggunakan atau terlihat menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga.
- e. Anggota mempunyai akses terhadap informasi rahasia tentang penerima jasa tidak boleh mengungkapkannya kepada publik. Karena itu, anggota tidak boleh membuat pengungkapan yang tidak disetujui kepada orang lain. Hal ini tidak berlaku untuk pengungkapan informasi dengan tujuan memenuhi tanggung jawab anggota berdasarkan standar professional.

- f. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan keharasiaan didefinisikan dan bahwa terdapat panduan mengenai sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan dimana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa professional dapat atau perlu diungkapkan.
3. Kompetensi pada Ranah Psikomotorik
- Kompetensi pada ranah psikomotorik mengandung arti kecakapan, kemampuan, kewenangan dan penugasan pada keterampilan teknis atau fisik. Kompetensi pada ranah ini yaitu keterampilan teknis juga memiliki penerapan sesungguhnya.

Adapun penerapan keterampilan teknis menurut Sukrisno Agoes (2013:163) sebagai berikut:

1. Penguasaan Teknologi Informasi (Komputer)

Dalam penguasaan teknologi informasi (komputer) audit yang terampil akan memilih pengauditan dengan bidang pengendalian yang diaudit, karena tidak semua bidang harus dilakukan secara manual. Pada zaman sekarang ini komputer diyakini membuat proses pengauditan menjadi lebih mudah.

2. Teknis Audit

Keterampilan teknis seorang auditor dapat dilihat dari auditor ketika menjalankan teknis audit, teknis audit sendiri merupakan cara-cara yang ditempuh auditor untuk memperoleh pembuktian membandingkan keadaan sebenarnya dengan seharusnya. Auditor yang terampil akan menggunakan cara yang baik dan benar sesuai dengan prosedur audit terhadap pengendalian perusahaan karena cara yang baik disesuaikan dengan bidang pengendalian yang diaudit.

2.1.3 Workload Auditor

2.1.3.1 Pengertian *Workload* Auditor

Menurut L. Hardi Pranoto dan Retnowati (2015:2) *workload* adalah:

“Beban kerja adalah tindakan yang bertujuan untuk mengetahui jumlah waktu yang diperlukan karyawan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.”

Menurut Tarwaka (2011:106) *workload* adalah:

“Beban Kerja (*Workload*) dapat didefinisikan sebagai suatu perbedaan antara kapasitas atau kemampuan pekerja dengan tuntutan pekerjaan yang harus dihadapi.”

Menurut Ashar Sunyoto Munandar (2001:381) *workload* adalah:

“Beban kerja adalah suatu kondisi dari pekerjaan dengan uraian tugasnya yang harus diselesaikan pada batas waktu tertentu.”

Fitriany (2011) menyebutkan bahwa beban kerja auditor adalah :

“Pekerjaan yang harus dikerjakan auditor, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah klien yang harus ditangani oleh seorang auditor atau terbatasnya waktu auditor untuk melakukan proses audit.”

Berdasarkan definisi diatas, dapat diinterpretasikan bahwa beban kerja (*workload*) adalah banyaknya satuan pekerjaan yang harus diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam melaksanakan audit seorang auditor harus mengatur beban kerjanya agar bekerja dengan maksimal.

2.1.3.2 Klasifikasi *Workload* Auditor

Menurut Ashar Sunyoto Munandar (2001:381-384) dimensi indikator *workload* meliputi:

1. Tuntutan Fisik dan Psikologis

Kondisi fisik berdampak terhadap kesehatan mental seorang tenaga kerja dan mempunyai pengaruh terhadap kondisi psikologi kinerja pegawai. Selain dampaknya terhadap kinerja pegawai, kondisi fisik juga dapat menghasilkan prestasi kerja yang optimal.

2. Tuntutan Tugas

Beban kerja atas tuntutan tugas yang berlebihan dan beban kerja yang terlalu sedikit dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Kerja shift/kerja malam sering kali menyebabkan kelelahan bagi pegawai akibat dari beban kerja yang berlebihan. Sedangkan beban kerja yang terlalu sedikit dapat menyebabkan kurang adanya rangsangan akan mengarah ke semangat dan motivasi yang rendah untuk kerja, karena merasa dirinya tidak maju-maju dan merasa tidak berdaya untuk memperlihatkan bakat dan keterampilannya. Beban kerja (*workload*) dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Beban kerja terlalu banyak, yang timbul akibat tugas yang terlalu banyak kepada tenaga kerja untuk diselesaikan dalam waktu tertentu.
- b. Beban kerja berlebihan, yaitu jika orang merasa tidak mampu untuk melaksanakan suatu tugas atau melaksanakan tugas tidak menggunakan keterampilan dan atau potensi dari tenaga kerja.

Menurut Tarwaka (2011:131) performansi kerja manusia terdiri dari

tiga dimensi ukuran beban kerja, yaitu:

1. Beban Waktu (*Time Load*)

Beban waktu yaitu beban yang menunjukkan jumlah waktu yang tersedia dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring tugas. Beban waktu sangat dekat hubungannya dengan penggunaan waktu yang menjadi metode utama dalam mengevaluasi seseorang pada saat menyelesaikan tugas-tugasnya. Beban waktu tergantung pada ketersediaan waktu senggang dan tumpang tindih yang terjadi diantara tugas-tugas.

2. Beban Usaha Mental (*Mental Effort*)

Beban usaha mental adalah sebuah indikator tentang jumlah perhatian atau tuntutan mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dengan beban usaha mental yang rendah maka konsentrasi dan perhatian yang dibutuhkan untuk mengerjakan sebuah tugas akan minimal jumlahnya dan oleh karena itu kinerja hampir menjadi sesuatu yang otomatis. Secara umum hal ini disebabkan oleh kompleksitas tugas dan jumlah informasi yang harus diproses oleh seorang operator yang melakukan tugas tersebut dengan baik. Tuntutan yang tinggi oleh usaha mental membutuhkan perhatian atau konsentrasi total yang disebabkan oleh adanya kompleksitas tugas atau jumlah informasi yang harus diproses. Aktivitas-aktivitas seperti melakukan kalkulasi, membuat keputusan, mengingat atau menyimpan informasi dan pemecahan masalah adalah contoh-contoh usaha mental.

3. Beban Tekanan Psikologis (*Psylogical Stress*)

Beban tekanan psikologis ini menunjukkan tingkat resiko pekerjaan, kebingungan dan frustrasi. Beban tekanan psikologis mengacu pada kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kebingungan, frustrasi yang terkait dengan kinerja tugas, sehingga membuat penyelesaian tugas menjadi lebih sulit untuk dilaksanakan. Pada tekanan dengan level rendah maka akan merasa relatif rileks, begitu tekanan meningkat maka akan terjadi distraksi dan aspek-aspek yang bersangkutan terkait dengan tugas yang disebabkan oleh faktor-faktor yang ada dalam lingkungan individu. Faktor-faktor tersebut meliputi hal-hal seperti motivasi, kelelahan, rasa takut, tingkat kemampuan, temperature, kebisingan, viberasi, atau ketenangan.

2.1.3.3 Pengukuran *Workload Auditor*

Pengukuran *workload* dapat dilakukan dalam berbagai prosedur, namun O'Donnell & Eggemeier dalam Muskamal (2010) telah menggolongkan secara garis besar ada tiga kategori pengukuran *workload*, di antaranya:

1. Pengukuran Subjektif

Pengukuran subjektif yaitu pengukuran yang didasarkan kepada penilaian dan pelaporan oleh pekerja terhadap beban kerja yang dirasakannya dalam menyelesaikan suatu tugas. Pengukuran jenis ini pada umumnya menggunakan skala penilaian (*rating scale*).

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yaitu pengukuran yang diperoleh melalui pengamatan terhadap aspek-aspek perilaku/aktivitas yang ditampilkan oleh pekerja. Salah satu jenis dalam pengukuran kinerja adalah pengukuran yang diukur berdasarkan waktu. Dengan begitu dapat mengetahui waktu penyelesaian suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja memiliki kualifikasi tertentu, di dalam suasana kerja yang telah ditentukan serta dikerjakan dengan suatu tempo kerja tertentu.

3. Pengukuran Psikologis

Pengukuran psikologis yaitu pengukuran yang mengukur tingkat beban kerja dengan mengetahui beberapa aspek dari respon psikologis pekerja sewaktu menyelesaikan suatu tugas/pekerjaan tertentu. Pengukuran yang dilakukan biasanya pada refleks pupil, pergerakan mata, aktivitas otot dan respon-respon tubuh lainnya.

Menurut Persellin, Schmidt dan Wilkins (2015):

“*Workload* yang dihadapi oleh auditor dapat dilihat dari jumlah klien yang ditangani oleh auditor, banyaknya jam kerja auditor serta terbatasnya waktu yang diamanatkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Peningkatan *workload* semakin terlihat seiring dengan memasuki *busy season*. Proses audit yang dilakukan ketika tekanan *workload* yang berlebihan akan menghasilkan kualitas audit yang lebih rendah.”

Menurut Persellin, Schmidt dan Wilkins (2015) *workload* dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah klien yang dihadapi auditor, maka indikator yang digunakan adalah:
 - a. Jumlah klien yang banyak
 - b. Kurangnya sumber daya audit
2. Jam kerja auditor, maka indikator yang digunakan adalah:
 - a. Lama waktu bekerja
 - b. *Dysfunctional audit behavior*
3. Terbatasnya waktu yang diamanatkan untuk menyelesaikan pekerjaan, maka indikator yang digunakan adalah:
 - a. Tuntutan waktu dari klien
 - b. Menurunnya kemampuan auditor menemukan kesalahan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam Muskamal (2010) menjelaskan bahwa dilakukannya pengukuran beban kerja memberikan beberapa manfaat kepada organisasi, yaitu:

1. Penataan/penyempurnaan struktur organisasi.
2. Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit.
3. Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja.
4. Sarana peningkatan kinerja kelembagaan.
5. Penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, penyusunan daftar susunan pegawai atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural.
6. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi.
7. Program mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan.
8. Program promosi pegawai.

9. *Reward and punishment* terhadap unit atau pejabat.
10. Bahan penyempurnaan program diklat.
11. Bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia.
12. Beban kerja memberikan beberapa keuntungan bagi organisasi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa pengukuran beban kerja dapat dilihat dari jumlah klien yang dihadapi, jam kerja auditor dan terbatasnya waktu yang diamanatkan untuk menyelesaikan pekerjaan.

2.1.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Workload Auditor

Menurut Aminah Soleman (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja (*workload*) adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu beban yang berasal dari luar tubuh pekerja, seperti :

 - a. Tugas (*Task*)

Tugas (*task*) ini meliputi tugas yang berfisat seperti stasiun kerja, tata ruang tempat kerja, kondisi ruang kerja, kondisi lingkungan kerja dan sikap kerja.
 - b. Organisasi Kerja

Organisasi kerja disini meliputi lamanya waktu kerja, waktu istirahat, shift kerja, sistem kerja dan sebagainya.
 - c. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja ini dapat memberikan beban tambahan yang meliputi lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja miniawi, lingkungan kerja biologis dan lingkungan kerja psikologis.
- b. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh akibat dari reaksi beban kerja eksternal yang berpotensi sebagai stressor, meliputi faktor somatis (jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, kondisi kesehatan, dan sebagainya) dan faktor psikis (motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, kepuasan, dan sebagainya).

2.1.4 Skeptisisme Profesional Auditor

2.1.4.1 Pengertian Skeptisisme Profesional Auditor

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011 Seksi 230) skeptisisme profesional auditor adalah sebagai berikut:

“Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan maksud dan integritas, pengumpulan bukti audit secara objektif.”

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2013:462) skeptisisme profesional adalah sebagai berikut:

“Skeptisisme profesional adalah suatu sikap auditor yang tidak mengasumsikan manajemen tidak jujur tetapi juga tidak mengasumsikan kejujuran absolut.”

Menurut Islahuzzaman (2012:429) skeptisisme profesional adalah:

“Skeptisisme profesional adalah bersikap ragu-ragu terhadap pernyataan-pernyataan yang belum cukup kuat dasar-dasar pembuktiannya. Tidak begitu percaya saja, tapi perlu pembuktian.”

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suharyanti (2010:42) mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai berikut:

“Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi kritis di bukti audit.”

Menurut Eko Ferri Anggriawan (2014) definisi Skeptisisme Profesional adalah:

“Skeptisisme Profesional adalah sikap kritis dalam menilai kehandalan asersi atau bukti yang diperoleh, sehingga dalam melakukan proses audit seorang auditor memiliki keyakinan yang cukup tinggi atas suatu asersi atau bukti yang telah diperolehnya dan juga mempertimbangkan kecukupan dan kesesuaian bukti yang diperoleh.”

Berdasarkan definisi dari para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa skeptisisme profesional auditor adalah sikap yang selalu curiga, tidak mudah percaya akan hal yang diamatinya. Seorang auditor yang profesional akan selalu mempertanyakan dan menilai secara kritis atas bukti audit.

2.1.4.2 Karakteristik Skeptisisme Profesional Auditor

Menurut Hurt, Eining dan Plumplee (2008) dalam Eko Ferry Anggriawan (2014) karakteristik skeptisisme profesional auditor disesuaikan dengan tahapannya masing-masing sebagai berikut:

1. Memeriksa dan Menguji Bukti (*Examination of Evidence*)

Karakteristik yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengujian bukti (*Examination of Evidence*) diantaranya:

a. Pikiran yang Selalu Bertanya (*Question Mind*)

Pikiran yang selalu bertanya yaitu karakteristik yang mempertanyakan alasan, penyesuaian dan pembuktian atas sesuatu. Karakter skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator:

- a) Menolak suatu pernyataan atau *statement* tanpa pembuktian yang jelas.
- b) Mengajukan banyak pertanyaan untuk pembuktian akan suatu hal.

b. Suspensi pada Penilaian (*Suspension on Judgement*)

Suspensi pada penilaian disini yaitu karakteristik yang mengindikasikan seseorang butuh waktu yang lebih lama untuk membuat pertimbangan yang matang dan menambah informasi tambahan untuk mendukung pertimbangan tersebut.

Karakter skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator:

- a) Membutuhkan informasi yang lebih.
 - b) Membutuhkan waktu yang lama namun matang untuk membuat suatu keputusan.
 - c) Tidak akan membuat keputusan jika semua informasi belum terungkap.
- c. Pencarian Pengetahuan (*Search for Knowledge*)

Pencarian pengetahuan yaitu karakteristik yang didasari oleh rasa ingin tahu yang tinggi.

Karakter skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator:

- a) Berusaha untuk mencari dan menemukan informasi baru.
 - b) Bertanya kepada teman sebagai sarana untuk menambah informasi.
2. Memahami Penyediaan Informasi (*Understanding Evidence Providers*)

Karakteristik yang berhubungan dengan memahami penyediaan informasi adalah pemahaman interpersonal (*Interpersonal Understanding*) yaitu karakter skeptis seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, motivasi dan integritas dari penyedia informasi.

Karakter skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator:

- a) Berusaha untuk memahami perilaku orang lain.
 - b) Berusaha untuk memahami alasan mengapa seseorang berperilaku.
3. Mengambil Tindakan Atas Bukti (*Acting on the Evidence*)

Karakteristik yang berhubungan dengan pengambilan tindakan atas bukti yang diperoleh adalah:

- a. Percaya Diri (*Self Confidence*)

Percaya diri yaitu percaya diri secara profesional untuk bertindak atas bukti yang sudah dikumpulkan.

Karakter skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator:

- a) Percaya akan kapasitas dan kemampuan diri sendiri.
 - b) Percaya mampu memberikan informasi sesuai bukti audit.
- b. Penentuan Sendiri (*Self Determination*)

Penentuan sendiri yaitu sikap seseorang untuk menyimpulkan secara objektif yang sudah dikumpulkan.

Karakter skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator:

- a) Tidak langsung menerima atau membenarkan pernyataan dari orang lain.
- b) Tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain atau suatu hal.
- c) Berusaha untuk mempertimbangkan penjelasan orang lain.

2.1.4.3 Unsur-unsur Skeptisisme Profesional Auditor

International Federation of Accountants (IFAC) dalam Theodorus M.

Tuannakotta (2011:78) unsur-unsur skeptisisme professional sebagai berikut:

1. *A critical assessment*
Yaitu auditor harus selalu membuat penilaian yang kritis dan tidak menerima begitu saja atas bukti audit yang diperoleh.
2. *With A Questioning Mind*
Yaitu auditor diharuskan untuk berfikir dengan selalu bertanya dan mempertanyakan perihal bukti audit.
3. *Of the Validity of Audit Evidence Obtained*
Yaitu keabsahan atau validitas dari bukti audit yang diperoleh.
4. *Alert to Audit Evidence that Contradicts*
Yaitu auditor diharuskan untuk selalu waspada terhadap bukti audit yang kontradiktif atau bertentangan.
5. *Brings Into Question the Realibility of Document and Responses to Inquiries and Other Information*
Yaitu auditor harus selalu mempertanyakan realibilitas atau keandalan dokumen dan tanggapan atas pertanyaan dan informasi lainnya.
6. *Obtained from Management and Those Charged with Governance*
Yaitu data yang diperoleh dari manajemen dan pihak yang berwenang dalam pengelolaan perusahaan.

2.1.4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Skeptisisme Profesional

Siegel dan Marconi dalam Noviyanti (2008) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi skeptisisme professional auditor adalah:

1. Faktor Sosial (kepercayaan)
Seorang auditor yang melakukan audit di lapangan akan berinteraksi dengan klien, manajemen dan staf klien. Interaksi sosial ini akan menimbulkan kepercayaan (*trust*) dari auditor terhadap klien dan mempengaruhi skeptisisme professional seorang auditor. Apabila tingkat kepercayaan auditor terhadap klien rendah, maka akan meningkatkan sikap skeptisisme professional auditor. Tetapi apabila tingkat kepercayaan auditor terhadap klien terlalu tinggi, maka akan menurunkan sikap skeptisisme profesioalnya.
2. Faktor Psikologikal (Penaksiran Risiko Kecurangan)
Skeptisisme professional auditor akan dipengaruhi oleh penaksiran risiko kecurangan (*fraud risk assessment*) yang diberikan oleh atasan auditor (*auditor in charge*) sebagai pedoman dalam

melakukan audit di lapangan. Auditor dengan penaksiran risiko kecurangan yang rendah akan mengurangi skeptisisme dibandingkan dengan auditor yang penaksiran risiko kecurangannya tinggi.

3. Faktor Personal (Kepribadian)

Perbedaan kepribadian (*personality*) individual menjadi dasar dari sikap seseorang termasuk sikap skeptisisme profesional. Kepribadian didefinisikan sebagai karakteristik seseorang seperti cara berfikir, berperasaan dan cara bertindak.

2.1.5 Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

2.1.5.1 Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan atau curang identik dengan ketidakjujuran. Curang atau kecurangan artinya apa yang dilakukannya telah melanggar aturan dan bermaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa berusaha.

Menurut Karyono (2013:4) kecurangan (*fraud*):

“*Fraud* atau kecurangan mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang diluar organisasi maupun dari dalam. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan pihak lain.”

Menurut Tuanakotta (2013:28) kecurangan (*fraud*) adalah:

“*Fraud* adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat jahat penipuan (*deception*), penyembunyian (*concealment*), penyalahgunaan kepercayaan (*violation of trust*), perbuatan yang bertujuan mengambil keuntungan haram (*illegal advantage*) yang bisa berupa uang, barang, harta atau tidak membayar jasa.”

Menurut Hiro Tugiman (2014:63) definisi kecurangan (*fraud*) adalah sebagai berikut:

“*Fraud* mencakup perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan lainnya yang dilakukan dengan niat untuk berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja demi keuntungan atau kerugian suatu organisasi oleh orang dalam atau juga oleh orang luar di luar organisasi tersebut.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat diinterpretasikan bahwa kecurangan (*fraud*) identik dengan perilaku tidak jujur dan juga licik yang dilakukan dengan sengaja dan mengambil keuntungan untuk pribadi maupun kelompok yang dapat merugikan orang lain.

2.1.5.1 Jenis-jenis Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Karyono (2013:17-24) kategori kecurangan (*fraud*) terbagi menjadi empat, yaitu:

- a. Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudlent Financial Statement*)

Kecurangan laporan ini terdiri dari kecurangan laporan keuangan (*financial statement*) dan kecurangan laporan lain (*non financial statement*) dengan menyajikan laporan keuangan menjadi lebih baik ataupun lebih buruk dari yang sebenarnya. Kecurangan ini bertujuan untuk:

 - a) Meninggikan nilai kekayaan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan saham, karena nilainya naik.
 - b) Untuk mendapatkan sumber pembiayaan atau memperoleh persyaratan yang lebih menguntungkan, dalam kaitannya untuk kredit perbankan atau kredit lembaga keuangan lainnya.
 - c) Untuk menggambarkan rentabilitas atau perolehan laba yang lebih baik.
 - d) Untuk menutupi ketidakmampuan dalam menghasilkan uang/kas.
 - e) Untuk menghilangkan persepsi negatif pasar.
 - f) Untuk memperoleh penghargaan/bonus karena kinerja perubahan baik.

b. Kecurangan Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset terdiri dari kecurangan kas, kecurangan persediaan dan aset lain.

a) Kecurangan Kas

Kecurangan kas terdiri dari kecurangan penerimaan kas sebelum dicatat, kecurangan kas setelah dicatat dan kecurangan pengeluaran kas termasuk kecurangan penggantian biaya.

b) Kecurangan Persediaan dan Aset Lain

Kecurangan persediaan barang dan aset lainnya terdiri dari pencurian dan penyalahgunaan. Seperti pengambilan persediaan barang di Gudang karena penjualan atau pemakaian untuk perusahaan tanpa ada upaya untuk menutupi pengambilan tersebut dalam akuntansi atau pencatatan Gudang.

c. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi disini terdiri atas pertentangan kepentingan, penyuaipan, hadiah tidak sah dan pemerasan ekonomi. Yang secara umum perbuatan ini dapat merugikan orang lain. Adapun bentuk korupsi tersebut terdiri dari:

a) Pertentangan Kepentingan

Bentuk korupsi ini terjadi ketika karyawan atau manajer mempunyai kepentingan pribadi pada suatu kegiatan atau transaksi bisnis pada organisasi dimana dia bekerja, kepentingan tersebut berlawanan dengan kepentingan organisasinya.

b) Suap

Suap adalah pemberian, permohonan atau penerimaan atas sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan seseorang karena pekerjaannya. Sesuatu yang bernilai tersebut dapat berupa uang, pelunasan hutang, hiburan, fasilitas, keuntungan bisnis, janji-janji manis, pinjaman, dan sebagainya.

c) Pemberian tidak sah

Pemberian tidak sah adalah pemberian sesuatu yang bernilai kepada seseorang karena keputusan yang diambil oleh seseorang. Keputusan itu berdampak memberi keuntungan kepada pemberi sesuatu yang bernilai tersebut.

d) Pemerasan Ekonomi

Pada bentuk korupsi ini, karyawan minta bayaran dari rekanan (vendor) atas keputusan yang diambil yang menguntungkan rekanan (vendor) tersebut. Caranya dengan jalan menakut-nakuti, dengan ancaman atau bujukan.

d. Kecurangan yang berkaitan dengan komputer

Pada zaman yang modern ini, kecurangan dapat dilakukan melalui komputer seperti mengubah masukan dan pengeluaran, menambah ataupun mengurangi pencatatan, menghilangkan dan

memasukkan data palsu. Selain itu perusakan komputer itu sendiri, pencarian informasi dan harta kekayaan, kecurangan keuangan atau pencurian kas, dan penggunaan atau penjualan jasa komputer secara tidak sah.

Menurut Reksojoedo (2013:31-33) kecurangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk tindakan, akan tetapi secara umum dapat dibagi menjadi tiga bentuk tindakan, yaitu:

a. Pencurian (*The act*)

Pencurian atau *the act* adalah tindak kecurangan yang dilakukan dengan cara mengambil asset milik orang atau pihak lain dengan tanpa ijin atau secara melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki atau digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

b. Penyembunyian (*Concealment*)

Penyembunyian adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan cara menyembunyikan benda, surat data, informasi atau fakta mengenai suatu transaksi atau mengenai asset perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

c. Perubahan (*Conversion*)

Perubahan adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan cara mengubah suatu benda, surat, data, informasi atau fakta mengenai suatu transaksi atau mengenai asset perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa segala bentuk kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta hak orang lain atau pihak lain. Kecurangan dalam bentuk apapun akan berpotensi merugikan pengguna laporan keuangan, karena menyediakan informasi laporan yang tidak benar untuk membuat keputusan.

2.1.5.2 Penyebab Terjadinya Kecurangan

Menurut Steve Alberecht dan Alvin A. Arrens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dikutip oleh Karyono (2013:8) penyebab terjadinya kecurangan disebut sebagai segitiga kecurangan (*fraud triangle theory*) yaitu:

1. Insentif/Tekanan

Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan apabila ada pendorong, yaitu:

- a. Tekanan Keuangan
Tekanan keuangan disini seperti banyaknya hutang, gaya hidup yang melebihi kemampuan keuangan, keserakahan dan kebutuhan lain yang tidak terduga.
- b. Kebiasaan Buruk
Kebiasaan buruk dapat menjadi pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan karena tekanan untuk kebiasaan buruknya tersebut, seperti judi, peminum minuman keras dan pecandu narkoba sehingga.
- c. Tekanan Lingkungan Kerja
Tekanan lingkungan kerja disini seperti kurang dihargai prestasi atau kinerja, gaji rendah dan merasa tidak puas dengan hasil pekerjaannya.
- d. Tekanan Lain
Tekanan lain seperti dari pasangan, karena tidak puas dengan penghasilan yang diperolehnya sehingga menjadi pendorong untuk melakukan kecurangan.

2. Kesempatan

Kesempatan timbul terutama karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Namun bisa juga karena lemahnya sanksi dan ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan kecurangan yaitu:

- a. Kegagalan untuk menertibkan pelaku kecurangan
- b. Terbatasnya akses terhadap informasi
- c. Ketidaktahuan, malas dan tidak sesuai kemampuan pegawai
- d. Kurangnya jejak audit.

3. Rasionalisasi/Pembenaran

Sikap, karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur dan juga mereka berada di dalam lingkungan yang

cukup menekan membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur. Pelaku kecurangan akan mencari pembenaran antara lain:

- a. Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa atau wajar dilakukan oleh orang lain.
- b. Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan merasa seharusnya menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya.
- c. Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah dan nanti akan dikembalikan.

2.1.5.3 Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Pada dasarnya tindakan kecurangan dapat dibongkat oleh seorang auditor. Karena adanya indikasi awal perencanaan yang baik untuk menyingkap segala sesuatu mengenai tindak kecurangan yang mungkin terjadi, tim audit harus memiliki intuisi yang tajam melihat berbagai aspek internal perusahaan yang riskan (rawan) terjadi kecurangan.

Menurut Karyono (2013:91) pengertian pendeteksian kecurangan sebagai berikut:

“Deteksi *fraud* adalah tindakan untuk mengetahui bahwa kecurangan (*fraud*) yang terjadi siapa pelakunya, siapa korbannya, dan apa penyebabnya.”

Menurut Valery G. Kumaat (2011:156) definisi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan sebagai berikut :

“Mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit).”

Sedangkan menurut Pramudyastuti (2014) definisi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan sebagai berikut :

“Kemampuan mendeteksi kecurangan berarti kemampuan menemukan atau menentukan suatu tindakan ilegal yang mengakibatkan salah saji dalam pelaporan keuangan yang dilakukan secara sengaja. Auditor yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi *fraud* pasti bisa mengetahui indikator-indikator kecurangan dalam instansinya yang memerlukan tindakan pemeriksaan lebih lanjut (investigasi).”

Menurut Nasution, Hafifah dan Fitriany (2012) definisi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan sebagai berikut :

“Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan merupakan kualitas dari seorang auditor dalam menjelaskan kekurangwajaran suatu laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan maupun organisasi dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan tersebut.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat diinterpretasikan bahwa kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah kemahiran atau keahlian seorang auditor untuk mendeteksi ada atau tidaknya kecurangan yang terdapat pada laporan keuangan.

Kunci pada pendeteksian kecurangan adalah untuk dapat melihat adanya kesalahan dan tindakan penyelewengan atas suatu organisasi (perusahaan). Kemampuan mendeteksi kecurangan berarti proses menemukan atau menentukan suatu tindakan ilegal yang dapat mengakibatkan salah saji dalam pelaporan keuangan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk mendeteksi kecurangan dapat dilihat dari tanda, sinyal, *red flags* suatu tindakan yang diduga menyebabkan atau potensial menimbulkan kecurangan.

Menurut Marcellina dan Sugeng (2009) secara garis besar tanda-tanda yang digunakan untuk mengindikasikan kecurangan suatu organisasi dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Tanda-tanda yang berasal dari dalam perusahaan
Tanda-tanda yang berasal dari dalam perusahaan meliputi penyimpangan pemakaian produksi yang ditunjukkan oleh beberapa laporan produksi yang telah diubah.
2. Tanda-tanda yang berasal dari luar perusahaan
Tanda-tanda yang berasal dari luar perusahaan meliputi kelebihan pembebanan jasa dan bahan, tagihan yang salah dikirimkan ke perusahaan seperti pemalsuan faktur, kekurangan bukti pendukung untuk suatu pembayaran barang dan jasa, dan lainnya.

Menurut Karyono (2013:92-94) kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan antara lain:

1. Kemampuan pengujian pengendalian intern
Pengujian pengendalian intern ini meliputi pengujian pelaksanaan secara mendadak dan secara acak. Hal ini untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan dengan kolusi sehingga pengendalian intern yang ada tidak berfungsi efektif.
2. Kemampuan audit keuangan atau audit operasional
Pada kedua jenis audit ini tidak ada keharusan auditor untuk mendeteksi dan mengungkapkan adanya kecurangan, akan tetapi auditor harus merancang dan melaksanakan auditnya sehingga kecurangan dapat terdeteksi.
3. Kemampuan mengumpulkan informasi dengan teknik elisitasi
Pengumpulan informasi dengan teknik elisitasi terhadap gaya hidup dan kebiasaan pribadi. Cara pendeteksian kecurangan ini dilakukan secara tertutup dan secara diam-diam mencari informasi tentang pribadi seseorang yang sedang dicurigai sebagai pelaku kecurangan.
4. Kemampuan penggunaan prinsip pengecualian dalam pengendalian dan prosedur
Pengecualian yang dimaksud disini adalah:
 - a. Adanya pengendalian intern yang tidak dilaksanakan atau di kompromikan.
 - b. Transaksi-transaksi yang janggal, misalnya: waktu transaksi terlalu banyak atau terlalu sedikit, tempat transaksi terlalu menyimpang dari biasanya.
 - c. Tingkat motivasi, moral dan kepuasan kerja terus menerus menurun.

- d. Sistem pemberian penghargaan yang ternyata mendukung perilaku tidak etis.
- 5. Kemampuan mengkaji ulang terhadap penyimpangan dalam kinerja operasi
 - Dari hasil uji ulang diperoleh penyimpangan yang mencolok dalam hal anggaran, rencana kerja, tujuan dan sasaran organisasi. Penyimpangan tersebut bukan karena adanya sebab yang wajar dari aktivitas bisnis yang lazim.
- 6. Pendekatan reaktif
 - Pendekatan reaktif meliputi adanya pengaduan dan keluhan karyawan, kecurigaan, dan intuisi atasan.

2.1.5.4 Praktek Mendeteksi Kecurangan

Menurut Priantara (2013:211-212) langkah-langkah mendeteksi kecurangan adalah sebagai berikut:

1. Langkah awal dari pendeteksian kecurangan ialah memahami aktivitas organisasi dan mengenal serta memahami seluruh sektor usaha. Pada pemahaman aktivitas organisasi ini sertakan personal yang berpengalaman dalam tim deteksi dan lakukan wawancara dengan personel kunci dari organisasi. Pada pemahaman ini diidentifikasi apakah organisasi telah menerapkan pengendalian maupun pelaksanaan. Pengendalian intern bukan saja untuk mencegah kecurangan, tetapi dirancang pula untuk dapat mendeteksi kecurangan secara diri.
2. Langkah untuk mendeteksi kecurangan selanjutnya adalah memahami tanda-tanda penyebab terjadinya kecurangan. Tanda-tanda penyebab terjadinya kecurangan berupa berbagai keanehan, keganjilan, dan penyimpangan dari keadaan yang seharusnya serta kelemahan dan pengendalian intern. Tanda-tanda tersebut diperoleh dari berbagai informasi, tetapi hasilnya masih merupakan tanda-tanda umum yang masih harus di analisis dan di evaluasi. Bila ada indikasi kuat, dilakukan investigasi terhadap gejala tersebut.
3. Pendeteksian selanjutnya dilakukan dengan *critical point of auditing* dan teknik analisis kepekaan. *Critical point of auditing* adalah teknik pendeteksian kecurangan melalui audit atas catatan akuntansi yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadi. Teknik analisis kepekaan adalah teknik pendeteksian kecurangan didasarkan pada analisis dengan memandang pelaku potensial. Analisisnya ditunjukkan pada posisi tertentu apakah ada peluang tindakan kecurangan dan apa saja yang dapat dilakukan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1. Hubungan Kompetensi Auditor, *Workload* Auditor dan Skeptisisme Profesional Auditor

Trotter (1986) dalam Mayangsari (2003) mengatakan bahwa seorang auditor yang berkompoten adalah orang yang dengan keterampilan mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau bahkan tidak pernah membuat kesalahan. Ketika kompetensi yang dimiliki auditor tinggi, auditor akan melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar yang berlaku, meskipun beban kerja (*workload*) yang ditanggungnya sedang meningkat. Beban kerja (*workload*) yang banyak akan membuat auditor kurang berkonsentrasi dengan baik selama proses audit. Auditor cenderung kurang waspada terhadap gejala-gejala kecurangan yang akan membuat auditor menjadi kurang mampu mendeteksi kecurangan.

Selain itu, auditor yang memiliki kompetensi tinggi akan bersikap lebih kritis dan objektif dalam proses audit serta lebih mampu menjelaskan ketidakwajaran yang dilakukan oleh manajemen dengan menggunakan sikap skeptisisme profesional. Dengan diterapkannya sikap skeptisisme profesional yang sifatnya selalu mencari kebenaran atas bukti audit yang diterimanya maka dapat mendeteksi kecurangan dengan lebih mudah.

Uraian di atas didukung dengan penelitian Faradina (2016) yang mengatakan bahwa skeptisisme merupakan sikap yang kritis dalam menilai bukti audit, mempertimbangkan dengan kesesuaian dan kecukupan bukti yang ada sehingga bukti audit tersebut memperoleh tingkat keyakinan yang tinggi, namun

rendahnya tingkat skeptisisme profesional yang dimiliki oleh seorang auditor merupakan salah satu penyebab gagalnya seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Maka sebagai seorang auditor, diperlukan sikap yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi secara kritis setiap bukti audit.

2.2.2. Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Menurut Ika dkk, (2009) Kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan audit yaitu pengetahuan dan kemampuan. Auditor harus memiliki pengetahuan untuk memahami entitas yang diaudit, kemudian auditor harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim serta kemampuan dalam menganalisa permasalahan.

Sri Lastanti (2005) mengungkapkan bahwa kompeten diperlukan agar auditor dapat mendeteksi dengan cepat dan tepat ada atau tidaknya kecurangan serta trik-trik rekayasa yang dilakukan untuk melakukan kecurangan tersebut. Keahlian yang dimiliki auditor dapat menjadikannya lebih sensitif (peka) terhadap suatu tindak kecurangan.

Agustina dan Poerwati (2013) mengemukakan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor maka semakin tinggi pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Seorang auditor yang memiliki kompetensi tinggi dalam penugasan auditnya dapat memudahkannya mendeteksi kecurangan.

Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa auditor yang memiliki sikap kompeten yang tinggi, maka semakin tinggi pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

2.2.3. Pengaruh Workload Auditor Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Setiawan dan Fitriany (2011) mengemukakan bahwa tingginya beban kerja akan menyebabkan kelelahan dan *dysfunctional behavior* sehingga menurunkan kemampuannya dalam menemukan kecurangan. Tetapi jika beban kerja auditor tersebut rendah, auditor akan memiliki lebih banyak waktu untuk mengevaluasi bukti yang ditemukan, sehingga auditor semakin bisa meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan.

Murtisari dan Ghazali (2006) mengemukakan bahwa beratnya beban pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pekerjaan akan menurunkan kepuasan kerja dan kinerja auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Pernyataan ini juga didukung dari hasil penelitian Hafifah dan Fitriany (2012) yang menunjukkan bahwa beban kerja berpengaruh negatif terhadap peningkatan kemampuan auditor dalam mendeteksi gejala-gejala kecurangan, artinya semakin sedikit beban kerja maka dapat memudahkan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa apabila beban kerja rendah, maka kemampuan mendeteksi kecurangan semakin meningkat.

2.2.4. Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Alvin Arens (2012:186) mengemukakan bahwa audit dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan kepastian yang layak untuk mendeteksi baik kekeliruan maupun kecurangan yang material dalam laporan keuangan. Untuk mencapainya audit harus di rencanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisisme professional atas semua aspek penugasan.

Ajeng Wind (2014:47-48) mengemukakan Skeptisisme adalah suatu sikap yang selalu curiga akan hal yang diamatinya. Kecurigaan tersebut tentunya akan membawa atau menimbulkan banyak pertanyaan yang kemudian mengarahkan pada penemuan sebuah jawaban. Seorang auditor harus memiliki sikap skeptis, namun dalam batas profesional. Artinya, setiap melakukan proses ia harus selalu curiga dengan pihak yang diperiksanya. Kecurigaan yang terus menerus akan mengarahkan pada pendeteksian kecurangan.

Menurut Theodorus M.Tuanakotta (2011:77) Skeptisisme profesional yang rendah menumpulkan kepekaan auditor dalam mendeteksi kecurangan baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda-tanda bahaya (*red flags, warning signs*) yang mengindikasikan adanya kesalahan dan kecurangan.

Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa auditor yang memiliki sikap skeptisisme professional yang tinggi akan selalu mencari informasi lebih banyak mengenai bukti audit yang diterimanya. Dengan begitu akan lebih mudah dalam mendeteksi kecurangan.

2.2.5. Pengaruh Kompetensi Auditor, *Workload* Auditor dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Terdapat keterkaitan dalam variabel Kompetensi, *Workload* dan Skeptisisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan, yang dilihat dari adanya hubungan antara Kompetensi, *Workload* dan Skeptisisme Profesional secara timbal balik. Sementara di sisi lain secara parsial terdapat pengaruh antara Kompetensi, *Workload* dan Skeptisisme Profesional.

Dilihat dari teori penghubung antara Kompetensi, *Workload* dan Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan secara parsial sebagai berikut:

1. Pengaruh Kompetensi terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Fuad (2015) mengatakan bahwa auditor yang berkompeten akan lebih mampu dan mudah mencari celah-celah dari gejala kecurangan yang terjadi serta mengumpulkan banyak bukti terkait kecurangan. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Seorang auditor yang memiliki kompetensi tinggi dalam penugasannya dapat memudahkan mendeteksi kecurangan.

2. Pengaruh *Workload* terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Setiawan dan Fitriany (2011) mengatakan bahwa tingginya beban kerja akan menyebabkan kelelahan dan *dysfuncional behavior* sehingga menurunkan kemampuannya dalam menemukan kecurangan. Tetapi jika beban kerja auditor tersebut rendah, auditor akan memiliki lebih banyak waktu untuk mengevaluasi bukti yang ditemukan, sehingga auditor semakin bisa meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan.

3. Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Ajeng Wind (2014:47-48) mengemukakan Skeptisisme adalah suatu sikap yang selalu curiga akan hal yang diamatinya. Kecurigaan tersebut tentunya akan membawa atau menimbulkan banyak pertanyaan yang kemudian mengarahkan pada penemuan sebuah jawaban. Seorang auditor harus memiliki sikap skeptis, namun dalam batas profesional. Artinya, setiap melakukan proses ia harus selalu curiga dengan pihak yang diperiksanya. Kecurigaan yang terus menerus akan mengarahkan pada pendeteksian kecurangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa terdapat pengaruh Kompetensi, *Workload* dan Skeptisisme Profesional Auditor secara simultan terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan berdasarkan dari teori penghubung Pengaruh Kompetensi terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan, Pengaruh *Workload* terhadap

Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan dan Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan.

2.2.6. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai dasar pendukung dalam melakukan penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kompetensi, *workload*, dan skeptisisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang mendukung penelitian penulis, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sandi Prasetyo (2015)	Pengaruh <i>Red Flags</i> , Skeptisisme Profesional Auditor, Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan.	Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Tetapi <i>Red flags</i> , skeptisisme profesional auditor, kompetensi, dan profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
2.	Aviani Sanjaya (2017)	Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi, Kompetensi, Pelatihan Auditor, dan Resiko Audit Terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan	Skepsisime Profesional, Kompetensi dan Pelatihan Auditor tidak memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Independensi dan Resiko Audit memiliki pengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.

3.	Dewi Larasati dan Windhy Puspitasari (2019)	Pengaruh Pengalaman, Independensi, Skeptisisme Profesional Auditor, Penerapan Etika dan Beban Kerja Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan	Pengalaman dan Beban kerja tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, independensi tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Skeptisisme profesional dan Penerapan etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
4.	Ni Kadek Lia Natalia dan Made Yenni Latrini (2020)	Dampak Pengalaman, Skeptisisme Profesional, dan Kompetensi pada Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan	Pengalaman, Skeptisisme Profesional dan Kompetensi berpengaruh positif pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
5.	Yulia Eka Sari dan Nayang Helmayunita (2018)	Pengaruh Beban Kerja, Pengalaman dan Skeptisisme Profesional Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan	Beban Kerja berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Pengalaman dan Skeptisisme Profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
6.	La Ode Anto, Santiadji Mustafa, dan Angela Florensia (2020)	Pengaruh Beban Kerja dan Pengalaman Audit Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan	Beban Kerja dan Pengalaman Audit berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, diantaranya:

Tabel 2.2

Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

Peneliti	Sandi Prasetyo	Aviani Sanjaya	Dewi Larasati dan Windhy Puspitasari	Ni Kadek Lia Natalia dan Made Yenni Latrini	Yulia Eka Sari dan Nayang Helmayunita	La Ode Anto, Santiadji Mustafa dan Angela Florensia	Fatimah Akbarani Usman
Tahun	2015	2017	2019	2020	2018	2020	2021
Red Flags	√	-	-	-	-	-	-
Profesionalisme	√	-	-	-	-	-	-
Kompetensi	√	√	-	√	-	-	√
Independensi	√	√	√	-	-	-	-
Pelatihan Auditor	-	√	-	-	-	-	-
Resiko Audit	-	√	-	-	-	-	-
Pengalaman	-	-	√	√	√	√	-
Beban Kerja	-	-	√	-	√	√	√
Penerapan Etika	-	-	√	-	-	-	-

Skeptisme Profesional	√	√	√	√	√	-	√
Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan	√	-	√	√	√	√	√
Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan	-	√	-	-	-	-	-

Keterangan:

Tanda √ = Diteliti

Tanda - = Tidak Diteliti

Berdasarkan tabel di atas, diinterpretasikan terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, di antaranya :

Penelitian Sandi Prasetyo yang berjudul Pengaruh *Red Flags*, Skeptisisme Profesional Auditor, Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada variabel independen Kompetensi dan Skeptisisme Profesional, dan variabel dependen Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan, dan memiliki perbedaan yaitu tahun penelitian, tempat penelitian dan beberapa variabel. Untuk tahun penelitian, Sandi Prasetyo melakukan penelitian pada tahun 2015, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2021. Tempat penelitian Sandi Prasetyo pada KAP Pekanbaru, Padang, dan Medan, sedangkan pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung. Variabel independen yang digunakan pada penelitian Sandi Prasetyo tetapi tidak digunakan oleh penulis yaitu *Red Flags*, Independensi, dan Profesionalisme, sedangkan variabel independen yang digunakan oleh penulis tetapi tidak digunakan oleh penelitian Sandi Prasetyo yaitu *Workload*.

Penelitian Aviani Sanjaya yang berjudul Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi, Kompetensi, Pelatihan Auditor, dan Resiko Audit Terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada variabel independen Skeptisisme Profesional dan Kompetensi, sedangkan untuk perbedaannya yaitu tahun penelitian, tempat penelitian dan beberapa variabel. Untuk tahun penelitian,

Aviany Sanjaya melakukan penelitian pada tahun 2017, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2021. Tempat penelitian Aviani Sanjaya pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Semarang, sedangkan pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung. Variabel dependen pada penelitian Aviany Sanjaya yaitu Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan, dengan variabel dependen penulis yaitu Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. Dan variabel independen yang digunakan pada penelitian Aviani Sanjaya tetapi tidak digunakan oleh penulis yaitu Independensi, Pelatihan Auditor, dan Resiko Audit, sedangkan variabel independen yang digunakan oleh penulis tetapi tidak digunakan oleh penelitian Aviani Sanjaya yaitu *Workload*.

Penelitian Dewi Larasati dan Windhy Puspitasari yang berjudul Pengaruh Pengalaman, Independensi, Skeptisisme Profesional Auditor, Penerapan Etika dan Beban Kerja Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada variabel independen Skeptisisme Profesional dan Beban Kerja, dan variabel dependen Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu tahun penelitian, tempat penelitian, dan beberapa variabel. Untuk tahun penelitian, Dewi Larasati dan Windhy Puspitasari melakukan penelitian pada tahun 2019, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2021. Tempat penelitian Dewi Larasati dan Windhy Puspitasari pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jabodetabek, sedangkan pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung. Variabel independen yang

digunakan pada penelitian Dewi Larasati dan Windhy Puspitasari tetapi tidak digunakan oleh penulis yaitu Pengalaman, Independensi, dan Penerapan Etika, sedangkan variabel independen yang digunakan oleh penulis tetapi tidak digunakan oleh penelitian Dewi Larasati dan Windhy Puspitasari yaitu Kompetensi.

Penelitian Ni Kadek Lia Natalia dan Made Yenni Latrini yang berjudul Dampak Pengalaman, Skeptisisme Profesional, dan Kompetensi pada Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada variabel independen Skeptisisme Profesional dan Kompetensi, dan variabel dependen Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu tahun penelitian, tempat penelitian, dan beberapa variabel. Untuk tahun penelitian, Ni Kadek Lia Natalia dan Made Yenni Latrini melakukan penelitian pada tahun 2020, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2021. Tempat penelitian Ni Kadek Lia Natalia dan Made Yenni Latrini pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Provinsi Bali, sedangkan pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung. Variabel independen yang digunakan pada penelitian Ni Kadek Lia Natalia dan Made Yenni Latrini tetapi tidak digunakan oleh penulis yaitu Pengalaman, sedangkan variabel independen yang tidak digunakan oleh penelitian Ni Kadek Lia Natalia dan Made Yenni Latrini tetapi digunakan oleh penulis yaitu *Workload*.

Penelitian Yulia Eka Sari dan Nayang Helmayunita yang berjudul Pengaruh Beban Kerja, Pengalaman dan Skeptisisme Profesional Terhadap

Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada variabel independen Beban Kerja dan Skeptisisme Profesional, dan variabel dependen Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu tahun penelitian, tempat penelitian, dan beberapa variabel. Untuk tahun penelitian, Yulia Eka Sari dan Nayang Helmayunita melakukan penelitian pada tahun 2018, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2021. Tempat penelitian Yulia Eka Sari dan Nayang Helmayunita pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, sedangkan pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung. Variabel independen yang digunakan pada penelitian Yulia Eka Sari dan Nayang Helmayunita tetapi tidak digunakan oleh penulis yaitu Pengalaman, sedangkan variabel independen yang tidak digunakan oleh penelitian Yulia Eka Sari dan Nayang Helmayunita tetapi digunakan oleh penulis yaitu Kompetensi.

Penelitian La Ode Anto, Santiadji Mustafa, dan Angela Florensia yang berjudul Pengaruh Beban Kerja dan Pengalaman Audit Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada variabel Beban Kerja, dan variabel dependen Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu tahun penelitian, tempat penelitian, dan beberapa variabel. Untuk tahun penelitian, La Ode Anto, Santiadji Mustafa, dan Angela Florensia melakukan penelitian pada tahun 2020, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2021. Tempat penelitian La Ode Anto, Santiadji Mustafa, dan Angela Florensia pada Inspektorat

Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung. Variabel independen yang digunakan pada penelitian La Ode Anto, Santiadji Mustafa, dan Angela Florensia tetapi tidak digunakan oleh penulis yaitu Pengalaman, sedangkan variabel independen yang tidak digunakan oleh penelitian La Ode Anto, Santiadji Mustafa, dan Angela Florensia tetapi digunakan oleh penulis yaitu Kompetensi dan Skeptisisme Profesional.

2.2.7. Bagan Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh Kompetensi, *Workload* dan Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan” maka model kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Landasan Teori

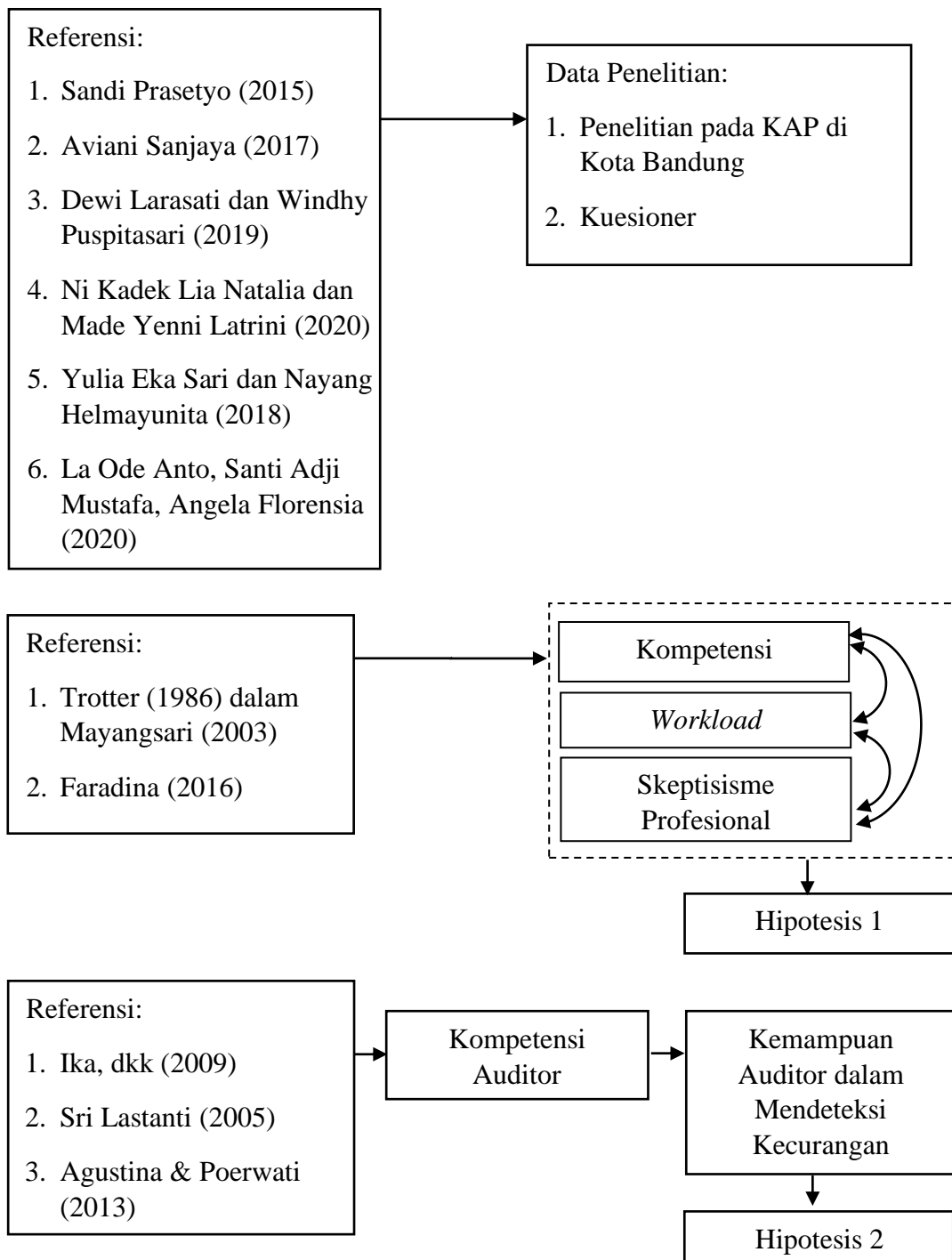
Kompetensi: Sukrisno Agoes (2013:146), Alvin A. Arrens et.all (2012:42), Siti Kurnia Rahayu & Ely Suharyati (2010:3), I Gusti Agung Rai (2010:61), Lyle & Spencer dalam Harhianto (2012:92)

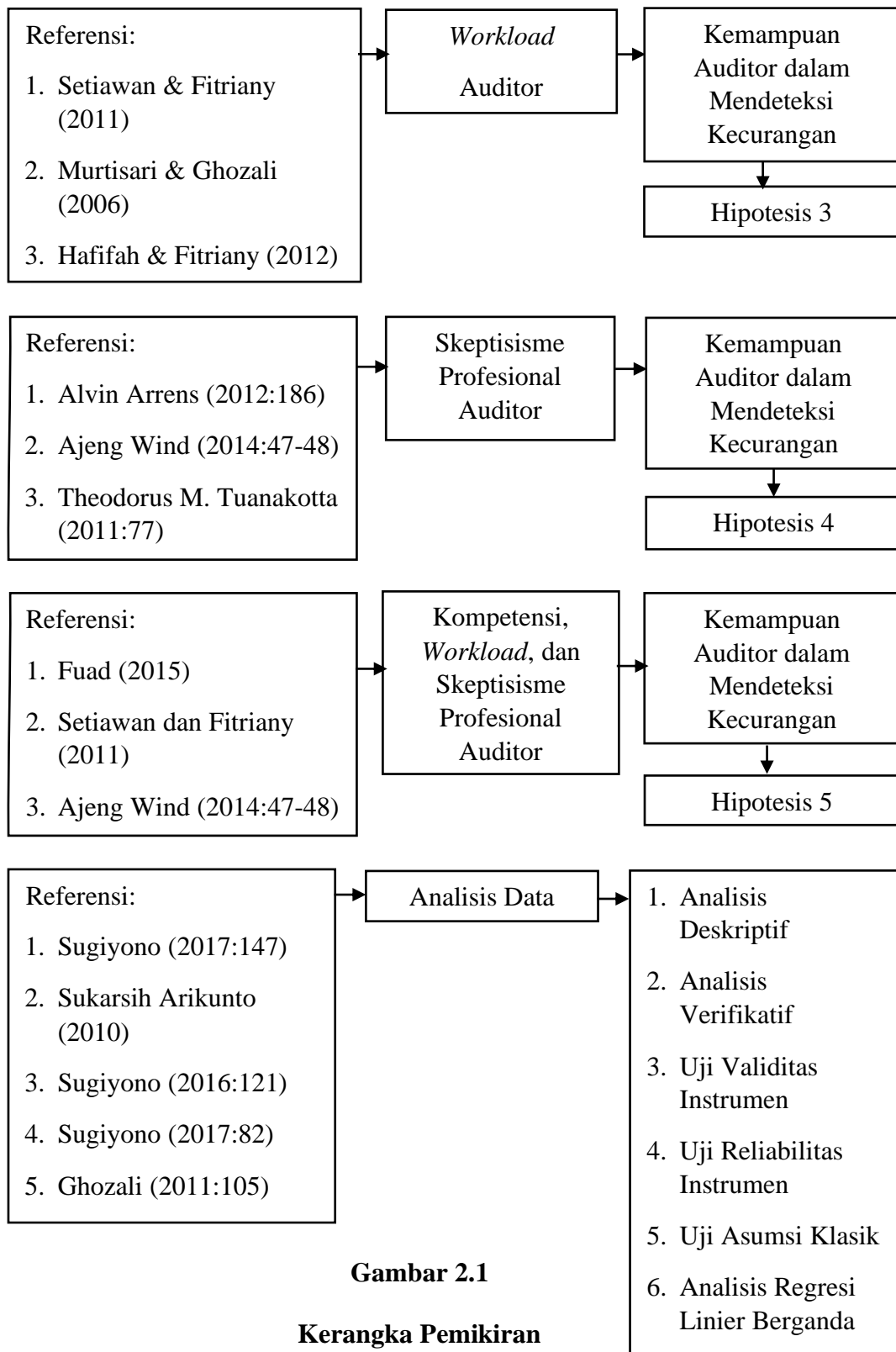
Workload: L. Hardi Pranoto & Retnowati (2015:2), Ashar Sunyoto munandar (2001:381), Tarwaka (2011:106), Fitriany (2011), O’Donnell & Eggemeier dalam Muskamal (2010), Aminah Soleman (2011)

Skeptisisme Profesional: Alvin A. Arrens, Randal J. Elder, Mark S Beasley (2013:462), Islahuzzaman (2012:429), Siti Kurnia Rahayu & Ely Suharyanti (2010:42), Eko Ferri Angriawan (2014), IFAC dalam Theodorus M. Tuannakotta (2011:78), Seigel & Marconi dalam Noviyanti (2008) SPAP, 2011 Seksi 230

Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan: Karyono (2013:91), Theodorus M. Tuannakotta (2013:28), Hiro Tugiman (2014:63), Valery G. Kumaat (2011:156), Pramudyastuti (2014), Nasution & Fitriany dalam Hartan (2012)







Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:93) pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, menjadi landasan bagi penulis untuk mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat hubungan antar Kompetensi, *Wokload* dan Skeptisisme Profesional.

H2: Terdapat pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan.

H3: Terdapat pengaruh *Workload* Auditor terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan.

H4: Terdapat pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan.

H5: Terdapat pengaruh Kompetensi, *Workload* dan Skeptisisme Profesional Auditor secara simultan terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

